

**PENGARUH *LEVERAGE*, OPINI BPK DAN TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP *INTERNET REPORTING* DENGAN
KOMPETISI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI EMPIRIS PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)**

***THE EFFECT OF LEVERAGE, BPK OPINION AND LEVEL OF INDEPENDENCE
OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE
TO THE INTERNET REPORTING WITH POLITIC COMPETITION AS
MODERATING VARIABLE
(Empirical Study on Provincial Government in Indonesia)***

Adien Ispanur Adha

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: adienispanur@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Leverage, BPK Opinion, Level of Independence of Local Governments Finance on Internet Reporting moderated by Political Competition in the Provincial Governments in Indonesia. The object of this research is the Provincial Government in Indonesia. In this study, sample of 31 provinces was selected using the purposive sampling method. Analysis tool used in this study is the Moderator Regression Analysis (MRA).

Based on the analysis that has been made the results are the leverage has a significant negative effect and the level of independence of local governments finance has a significant positive effect on the internet reporting. BPK Opinion has no effect on the internet reporting. Political competition that moderates leverage, BPK opinion, and the level of independence of local governments finance does not affect the internet reporting.

Keywords: Leverage, BPK Opinion, Level of Independence of Local Governments Finance, Internet Reporting, Political Competition

PENDAHULUAN

Pengembangan dan pengelolaan potensi daerah oleh pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Guna mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu menciptakan sistem

pengelolaan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan efektif dan efisien. Dengan terciptanya sistem pengelolaan yang baik maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpinnya. Tujuannya ialah agar rakyat dapat memberikan *support* kepada pemerintah yang saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan, sehingga dapat berjalan dengan baik (Hilmi & Martani,2012).

Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berisikan tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa segala informasi publik memiliki sifat terbuka, mudah diakses, tepat waktu, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan amanat dari peraturan tersebut secara eksplisit internet merupakan suatu media, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala bentuk informasi dengan mudah, murah, serta cepat. Dengan kemudahan akan hal tersebut, internet menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam mempublikasikan seluruh informasinya kepada stakeholder dengan biaya murah serta tepat waktu.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada September 2013 memaparkan bahwa persentase pemerintah daerah yang melakukan publikasi melalui internet masihlah terbilang rendah karena dibawah 50% dari total pemerintah daerah di Indonesia. Pelaporan kinerja melalui internet seharusnya sudah menjadi suatu kewajiban oleh pemerintah daerah, karena telah dikeluarkan instruksi menteri dalam negeri nomor 188.522/1797/SJ tahun 2012 tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikan dokumen kinerja keuangannya. Berdasarkan data tersebut telah terjadi ketimpangan antara realitas dan kondisi ideal, dikarenakan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah resmi diterapkan sejak tahun 2008, akan tetapi setelah kurang lebih 5 tahun penerapan UU tersebut tingkat pelaksanaan UU masihlah pada kisaran 50% atau sebagian pemerintah daerah yang mengimplementasikan.

Kewajiban pemerintah daerah dalam mempublikasikan informasi terkait kinerja keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Di samping hal tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatur pengelolaan anggaran daerah dengan “mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan instruksi Mendagri pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada publik.” Menurut instruksi tersebut pemda berkewajiban mempublikasikan laporan terkait kinerja keuangan dan non-keuangan kepada publik.

Diterbitkannya Instruksi Mendagri merupakan langkah untuk meminimalisir ketimpangan kualitas dan informasi atas laporan keuangan juga bertujuan untuk membentuk kontrol terhadap pemerintah atas sebuah kinerjanya baik berupa kinerja keuangan maupun non keuangan. Kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangatlah penting, sebab dengan adanya kontrol dari masyarakat akan meminimalisir penyimpangan atas penyelewengan jabatan serta perilaku korupsi. Menurut data yang dipublikasi oleh lembaga *Transparency International* menunjukkan bahwa seluruh wilayah yang berada di Indonesia marak praktik-praktik korupsi, sehingga Indonesia menduduki peringkat 90 negara tertransparan dari 180 negara.

Ingram (1984) telah melakukan penelitian dengan mengkombinasikan faktor ekonomi dan politik untuk mengamati faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah di negara bagian Amerika Serikat. Adapun Medina (2012) juga telah melakukan penelitian terhadap 257 sampel yang terdiri dari 61 pemerintah kota dan 196 pemerintah kabupaten dengan variabel independen diantaranya: ukuran pemerintah daerah; tingkat kemandirian daerah; rasio pembiayaan hutang; kompleksitas pemerintah; tingkat pendapatan perkapita untuk menguji determinan informasi publik. Hasil dari penelitian

tersebut ialah ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Penelitian Nosihana dan Yaya (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan 175 sampel yang terdiri dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2014 dengan menggunakan enam variabel independen yang terdiri dari: tipe pemda, ukuran pemda, kekayaan pemda, leverage, kompetisi politik, dan opini audit serta variabel dependennya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ tahun 2012. Pada hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kompetisi politik, ukuran Pemda berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yakni Nosihana dan Yaya (2016), dan Medina (2012) dengan mengambil 3 (tiga) variabel (leverage, opini BPK dan tingkat kemandirian keuangan Pemda), sedangkan untuk variabel moderasi penelitian ini menggunakan variabel kompetisi politik yang merupakan variabel dari penelitian Nosihana dan Yaya (2016). Perbedaan penelitian dari penelitian Nosihana dan Yaya (2016) ialah pada penelitian ini menguji secara lebih kompleks faktor yang memengaruhi pelaporan kinerja melalui internet, untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dapat terbuka kepada publik atas apa saja yang telah dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian menggunakan variabel moderasi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penambahan variabel moderasi berupa variabel kompetisi politik didalam penelitian ini berfungsi untuk menanggulangi munculnya sikap oportunis yang dilakukan oleh eksekutif. Pemerintah daerah yang memperoleh hasil kinerja yang tidak bagus akan cenderung untuk tidak memublikasikan hasil kerjanya kepada publik agar citra baik pemerintah akan terus terjaga. Variabel moderasi berupa kompetisi politik digunakan untuk meminimalisir sikap *opportunisme* yang dilakukan oleh eksekutif. Pihak

legislative yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, akan memberikan tekanan yang tinggi apabila terjadi perbedaan penguasa antara legislatif dan eksekutif.

Penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan hutang (*leverage*), opini audit, tingkat kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan kompetisi politik untuk mengetahui pengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Penilaian dilakukan menurut instruksi menteri dalam negeri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 untuk aspek kinerja keuangan pemerintah daerah yang wajib mempublikasikan 12 dokumen yang terkait dengan keuangan pemerintah daerah, serta merujuk kepada PP No 8 Tahun 2006 terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebuah instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mempublikasikan ke khalayak umum.

Obyek dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah tingkat provinsi yang ada di Indonesia dengan alasan pemerintah daerah tingkat provinsi dapat menjadi representatif dari kondisi pelaksanaan aturan yang telah dibuat apakah terlaksana dengan baik atau sebaliknya. Alasan lain dari penggunaan obyek tersebut ialah pemerintah provinsi dinilai memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota sehingga permasalahan sarana dan prasarana tidak akan menjadi penyebab tidak dipublikasikannya laporan kinerja kedalam internet. Berdasarkan uraian latar belakang tersebutlah maka peneliti termotivasi untuk meneliti “PENGARUH *LEVERAGE*, OPINI BPK DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP INTERNET REPORTING DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DI INDONESIA

DENGAN KOMPETISI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia)”.
Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Berdasarkan pendapat dari Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan bahwa teori *stewardship* bermaksud bahwa *stewardship* menggambarkan manajemen tidak secara khusus memiliki termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi atau sasaran utama yang hendak dicapai. Pemerintah yang menjalankan peran sebagai salah satu pihak yang memiliki pengetahuan tentang informasi yang lebih banyak terkait apa saja yang telah dilakukan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat (Nosihana & Yaya, 2016). Dalam konteks *internet reporting*, pemerintah yang memiliki kuasa atas informasi yang masyarakat tidak ketahui harus memublikasikan informasi tersebut kepada publik sebagai bentuk dari sikap *steward* pemerintah. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan publikasi hasil kinerjanya kepada publik bukan atas dasar paksaan dari publik melainkan bentuk tanggungjawab moral yang diemban oleh pemerintah dikarenakan pemerintah merupakan rakyat yang sedang menjalankan roda pemerintahan.

Teori *Signalling*

Hilmi & Martani (2012) mengungkapkan bahwa teori *signalling* merupakan sinyal yang diberikan oleh pemerintah (*steward*) kepada rakyat yang berperan sebagai *principal* sebagai bentuk dari sebuah tanggung jawab serta amanah yang telah rakyat berikan kepada pemerintah dalam membangun negara menuju arah yang lebih baik. Ettredge et al. (2001) menyatakan bahwa *internet reporting* membantu dalam menyebarluaskan informasi mengenai keunggulan-keunggulan organisasi yang merupakan sinyal positif organisasi untuk *stakeholder*. Hal ini berarti, *internet reporting* merupakan sarana untuk mengkomunikasikan

sinyal positif perusahaan kepada publik. Sinyal yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk laporan keuangan maupun non-keuangan. Tujuan dari pemberian sinyal kepada masyarakat ialah agar rakyat dapat terus mendukung program ataupun keberlangsungan pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

Internet Reporting

Internet reporting atau pelaporan melalui internet merupakan suatu cara yang dilakukan oleh organisasi untuk mencantumkan laporan kinerjanya melalui internet/website (Adi, 2012). Menurut Ghazali dan Chariri (2007), pengungkapan adalah sebuah pemberian informasi yang berguna atau bermanfaat kepada pihak yang memerlukan informasi. Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa publikasi laporan kinerja pemerintah melalui *e-Government* atau disebut dengan internet reporting merupakan salah satu bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas pengelolaan daerah kepada masyarakat. Publikasi melalui internet atas laporan keuangan serta kinerja instansi pemerintahan telah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Selain dalam bentuk instruksi presiden, penguatan aturan telah dilakukan pemerintah pusat dengan menerbitkan PP No. 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Publikasi laporan kinerja pemerintah menggunakan internet merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat mengetahui hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah secara mudah, murah, serta cepat.

Teori *Opportunisme*

Perilaku *oportunisme* merupakan sifat yang dilakukan individu atau kelompok untuk kepentingan yang menguntungkan diri pribadi atau kelompoknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *oportunisme* dipahami sebagai sebuah paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Berdasarkan sikap *oportunis* yang demikian, menjadi sumber perkembangan perilaku oportunis dikalangan pejabat eksekutif maupun legislatif (Pratolo S dan Amalia CR, 2013). Indikasi praktik oportunistik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif muncul ketika dalam pelaksanaan kegiatan, program, atau kewajiban tidak sesuai dengan kondisi ideal. Dalam konteks internet reporting praktik oportunistik pemerintah daerah(eksekutif) ialah eksekutif cenderung untuk tidak memublikasikan laporan kinerja kepada publik/masyarakat apabila hasil kinerjanya tersebut dirasa tidak baik, namun apabila hasil kinerja pemerintah dirasa baik maka pemerintah daerah tersebut akan cenderung memublikasikan hasil kinerjanya kepada publik. Pemerintah daerah yang ingin selalu mendapatkan citra baik dari masyarakat memilih untuk tidak melaporkan kinerjanya kepada publik. Hal tersebut dilatar belakangi atas asumsi dengan adanya bukti kinerja yang baik oleh pejabat daerah maka akan membuat pejabat daerah terpilih kembali oleh masyarakat di periode yang akan datang.

Hubungan *Leverage* terhadap *Internet Reporting*

Leverage adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjam dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Penting menjadi pengetahuan publik/masyarakat dalam mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam menjamin hutang, karena hal tersebut berkaitan dengan seberapa efektif dan efisien pemerintah dapat mengelola sebuah daerahnya. Menurut Styles dan Tennyson (2007) pemerintah daerah yang menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat atas penggunaan hutang tersebut.

Penelitian selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) dan Nosihana & Yaya (2016) juga menyatakan bahwa semakin kecil rasio leverage pemerintah daerah maka semakin besar kecenderungan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

H₁ : Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

Hubungan Opini BPK terhadap *Internet Reporting*

BPK sebagai lembaga resmi negara yang berkewenangan melakukan pemeriksaan atas kinerja keuangan suatu instansi pemerintah. Dari sebuah opini audit yang dikeluarkan oleh BPK, nantinya akan dijadikan sebuah alat ukur kinerja dari sebuah pemerintah daerah apakah memiliki kualitas akuntabilitas yang baik ataupun sebaliknya. Hilmi dan Martani (2012) mengemukakan bahwa tingkat penyimpangan yang tinggi akibat perilaku aparat pemerintah akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini BPK WTP akan cenderung memublikasikan hasil kinerjanya tersebut kepada publik sebagai tanggungjawab seorang steward dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan tetapi kondisi berbeda apabila kinerja yang diperoleh pemerintah daerah tersebut kurang baik. Penelitian ini merujuk dari Trisnawati dan Achmad (2014) serta Nosihana dan Yaya (2016) yang menemukan bahwa semakin kecil tingkat penyimpangan yang pada akhirnya pemerintah daerah tersebut mendapatkan opini BPK Wajar tanpa pengecualian akan cenderung untuk memublikasikan laporan kinerjanya dari pada pemda yang mendapat banyak tingkat penyimpangan.

H₂ : Opini BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Internet Reporting*.

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran operasional daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Medina,2012). Berdasarkan konsep dasar dari teori *oportunity* individu dan kelompok akan cenderung bersikap oportunis. Pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang besar mengindikasikan kinerja pemerintah daerah tersebut baik, hal tersebut didasarkan pada semakin besar rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menghimpun secara optimal pendapatan asli daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah atas hal tersebut merupakan suatu prestasi dari kinerjanya sehingga pemerintah akan memiliki kecenderungan untuk melakukan publikasi kinerjanya melalui internet sebagai sinyal bahwa *steward* berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini selaras dengan Medina (2012) terkait pengaruh tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah terhadap pelaporan kinerja melalui internet menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif diantara kedua variabel tersebut.

H₃ : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

Interaksi antara kompetisi politik terhadap *Leverage* dengan *Internet Reporting*.

Semakin besar rasio pembiayaan hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menjaminkan aset-aset daerah untuk pelunasan hutang secara besar. Sehingga semakin kecil leverage yang diperoleh suatu pmda, maka hal tersebut prestasi bagi pemerintah daerah tersebut. Untuk memberikan signal yang baik kepada masyarakat pemerintah daerah akan sukarela mempublikasikan salah satu hasil kinerjanya kepada masyarakat sebagai kewajiban seorang steward, akan tetapi apabila kinerja yang telah dilakukan pemerintah tidak baik, maka akan muncul kecenderungan

pemerintah untuk tidak mempublikasikan laporan kinerjanya kepada publik. Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintah atas perintah undang-undang, memiliki hak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah. Sehingga untuk meminimalisir tingkat oportunistis eksekutif yang memiliki kecenderungan untuk tidak mempublikasikan kinerja apabila hasil kinerja tidak baik akan dapat diminimalisir.

Selain daripada hal tersebut, dengan ada perbedaan penguasa antara eksekutif dan legislatif semakin meningkatkan tendensi politik antar kedua lembaga tersebut. Sehingga isu-isu terkait pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi yang mudah untuk disinggung, akibatnya kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi.

H₄ : Kompetisi Politik memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

Interaksi antara kompetisi politik terhadap *Opini Audit* dengan *Internet Reporting*

Setiap akhir periode akuntansi sebuah organisasi memiliki tanggungjawab kepada *stakeholder* untuk melaporkan laporan keuangannya kepada pihak ketiga yang independen untuk diaudit. Pemerintah daerah yang juga merupakan bagian dari organisasi sektor publik juga melaporkan laporan kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. BPK yang merupakan sebuah lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepada lembaga ataupun institusi negara akan melaporkan hasil auditnya yang dapat dijadikan alat ukur seberapa lembaga, institusi ataupun pemerintah daerah tersebut berakuntabilitas baik.

Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintah atas perintah undang-undang, memiliki hak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah. Sehingga untuk meminimalisir tingkat *oportunistis* eksekutif yang memiliki kecenderungan

untuk tidak mempublikasikan kinerja apabila hasil kinerja tidak baik akan dapat diminimalisir. Selain daripada hal tersebut, dengan ada perbedaan penguasa antara eksekutif dan legislatif semakin meningkatkan tendensi politik antar kedua lembaga tersebut. Sehingga isu-isu terkait pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi yang mudah untuk disinggung, akibatnya kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi.

H₅ : Kompetisi Politik memperkuat hubungan antara Opini BPK terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

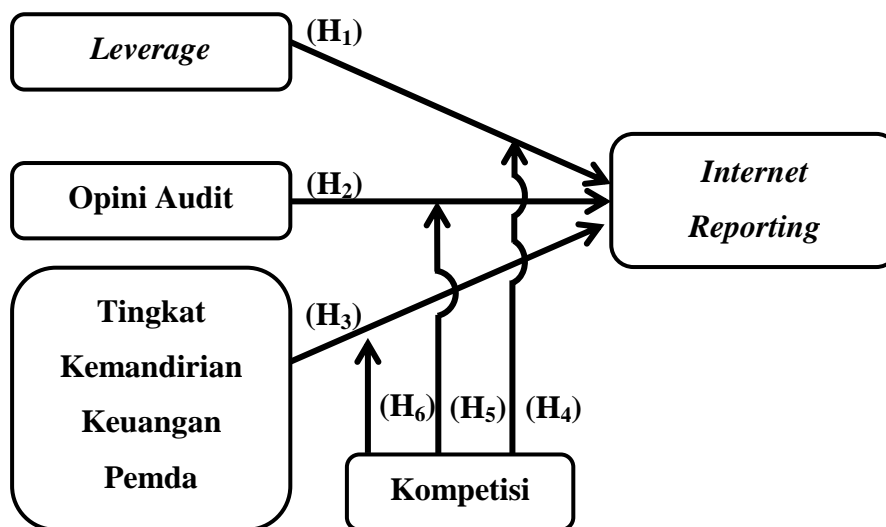
Interaksi antara kompetisi politik terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan *Internet Reporting*.

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan rasio kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran operasional daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Medina,2012). Semakin besar rasio atau kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran operasional menggunakan pendapatan asli daerah maka semakin tergolong baik daerah tersebut. Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintah atas perintah undang-undang, memiliki hak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah. Sehingga untuk meminimalisir tingkat *oportunistis* eksekutif yang memiliki kecenderungan untuk tidak mempublikasikan kinerja apabila hasil kinerja tidak baik akan dapat diminimalisir.

Selain daripada hal tersebut, proses jalannya roda pemerintahan dengan kondisi terjadi perbedaan pemangku kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sering menimbulkan konflik horizontal. Eksekutif yang mendapatkan tekanan dari legislatif untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berusaha memberikan sinyal-sinyal baik kepada

masyarakat untuk meminimalisir tendensi politik yang muncul akibat hal tersebut. Selain daripada hal tersebut, bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

H₆ : Kompetisi Politik memengaruhi hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).



(Gambar 2.1)

Skema Model Penelitian

MODEL PENELITIAN

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah provinsi, laporan audit BPK RI, dan data dari KPU-D.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut terdiri atas:

1. Mempunyai website resmi yang dapat diakses dan menggunakan domain .go.id
2. Laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2017 telah diaudit BPK;
3. Data-data pendukung untuk variabel independen lainnya dapat diperoleh didalam website resmi pemerintah daerah terkait seperti : BAPEDA, BPKAD, atau KPU-D;
4. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan metode studi literatur yang berupa jurnal, skripsi, tesis atau data lainnya yang telah diterbitkan oleh pihak lain. Pada penelitian ini variabel leverage (rasio pembiayaan hutang), opini audit, tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan variabel independen yang akan diteliti. Variabel moderasi kompetisi politik menggunakan perbandingan jumlah dewan partai oposisi dengan jumlah total anggota dewan. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini ialah dengan membuat rating/indeks yang berdasarkan pada dipublikasikannya atau tidak laporan keuangan serta non keuangan yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 dan dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini mengambil sampel Pemerintah Provinsi di Indonesia, dengan sampel yang tersaring dengan *purposive saampling* sebagai berikut:

Tabel 1
Pengambilan Sampel Provinsi di Indonesia

Keterangan	Jumlah Provinsi	Total
Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2017.	34	34
Pemerintah provinsi yang tidak memiliki website resmi serta dapat diakses dan menggunakan domain .go.id	2	2
Pemerintah provinsi yang yang laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2017 tidak diaudit BPK;	-	-
Data-data pendukung untuk variabel independen lainnya tidak dapat diperoleh didalam website resmi pemerintah daerah terkait seperti : BAPEDA, BPKAD, atau KPU-D;	-	-
Kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan langsung.	1	1
Total Pemerintah provinsi yang dijadikan sampel	31	31

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2019.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 yang bersumber dari hasil pengolahan data dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel awal berjumlah 34 pemerintah provinsi. Penelitian ini berfokus pada pemerintah provinsi yang ada diseluruh Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak sama dengan jumlah pemerintah provinsi yang ada di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, seperti pemerintah provinsi tidak memiliki website resmi ataupun website pemerintah provinsi tersebut tidak dapat diakses atau tidak menggunakan domain .go.id yang berjumlah 2 provinsi. Kemudian kepala daerah yang memimpin pemerintahan di provinsi tersebut tidak dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan langsung berjumlah 1 provinsi. Sehingga diperoleh sampel yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 31 provinsi.

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian pada tabel 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Internet Reporting</i>	31	0,000	1,000	0,32484	0,303314
<i>Leverage</i>	31	0,000	0,136	0,03613	0,030886
Opini BPK	31	1	1	1	0,00000
Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	31	0,058	0,593	0,35752	0,154056
Kompetisi Politik	31	0,215	0,840	0,49719	0,201777
Valid N	31				

Sumber : *Output SPSS v.15.0.*

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel *internet reporting* memiliki nilai minimum 0,000, nilai maximum 1,000 dan nilai rata-rata(*mean*) 0,32484. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum 0,000, nilai maximum 0,136 dan nilai rata-rata(*mean*) 0,03613. Variabel opini BPK memiliki nilai minimum 1, nilai maximum 1 dan nilai rata-rata(*mean*) 1. Variabel tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah memiliki nilai minimum 0,058, nilai maximum 0,593 dan nilai rata-rata(*mean*) 0,35752. Sedangkan variabel kompetisi politik memiliki nilai minimum 0,215, nilai maximum 0,840 dan nilai rata-rata(*mean*) 0,49719.

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Test</i>	Nilai Sig	Keterangan
Persamaan 1	0,734	Residual Berdistribusi Normal
Persamaan 2	0,718	Residual Berdistribusi Normal
Persamaan 3	-	Data konstan
Persamaan 4	0,874	Residual Berdistribusi Normal

Sumber: *Output SPSS v.15.0*

Hasil uji normalitas untuk model persamaan ke-1,2,3, dan 4 pada tabel 3 menunjukkan hasil bahwa nilai sig persamaan 1 sebesar 0,734 atau 73,4% , persamaan 2 sebesar 0,718 atau 71,8%, persamaan 3 tidak dapat diolah dan persamaan 4 sebesar 0,874 atau 87,4% lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 atau 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

	<i>Variabel</i>	Nilai Sig
Persamaan 1	<i>Leverage</i>	0,192
	Opini BPK	-
	Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	0,369
Persamaan 2	<i>Leverage</i>	0,620
	Kompetisi Politik	0,237
	Moderasi <i>Leverage</i>	0,313
Persamaan 3	Opini BPK	---
	Kompetisi Politik	---
	Moderasi Opini BPK	---
Persamaan 4	Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	0,653
	Kompetisi Politik	0,730
	Moderasi Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	0,864

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 nilai variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil pengolahan data tersebut membuktikan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas kecuali untuk persamaan ke-3 yang disebabkan data tidak dapat diolah.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

	<i>Variabel</i>	Tollerance	VIF
Persamaan 1	<i>Leverage</i>	1,000	1,000
	Opini BPK	1,000	1,000
	Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	1,000	1,000
Persamaan 2	<i>Leverage</i>	1,309	0,764
	Kompetisi Politik	1,198	0,835
	Moderasi <i>Leverage</i>	1,534	0,652
Persamaan 3	Opini BPK	---	---
	Kompetisi Politik	---	---
	Moderasi Opini BPK	---	---
Persamaan 4	Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	1,781	0,561
	Kompetisi Politik	1,871	0,535
	Moderasi Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda	1,070	0,935

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 nilai variabel memiliki nilai *tollerance* >0,1 dan VIF <10. Hasil pengolahan data tersebut membuktikan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengalami multikolinearitas kecuali untuk persamaan ke-3 yang disebabkan data tidak dapat diolah.

Uji Hipotesisi – Uji Nilai F

Tabel 6
Hasil Uji Simultan

	<i>Model</i>	<i>Sum of Square</i>	<i>Df</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Persamaan 1	<i>I Regression</i>	0,900	2	0,450	6,771	0,004
	<i>Residual</i>	1,860	28	0,066		
	<i>Total</i>	2,760	30			
Persamaan 2	<i>I Regression</i>	0,444	3	0,148	1,725	0,185
	<i>Residual</i>	2,316	27	0,086		
	<i>Total</i>	2,760	30			

Persamaan 3	<i>I Regression</i>	---	--	---	---	---
	<i>Residual</i>	---	--	---		
	<i>Total</i>	---	--			
Persamaan 4	<i>I Regression</i>	0,819	3	0,273	3,799	0,022
	<i>Residual</i>	1,941	27	0,072		
	<i>Total</i>	2,760	30			

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 6 persamaan 1 dan 4 sig $< \alpha$ 0,05 yang berarti *leverage*, tingkat kemandirian keuangan pemda, dan *leverage*, kompetisi politik dan tingkat kemandirian keuangan pemda yang dimoderasi kompetisi politik berpengaruh terhadap *internet reporting* sedangkan nilai dari variabel opini BPK tidak dapat diolah bersamaan dengan variabel lain karena bersifat konstan atau data tersebut memiliki nilai yang sama. Persamaan 2 sig $> \alpha$ 0,05 maka, dapat dikatakan bahwa *leverage*, kompetisi politik dan *leverage* yang dimoderasi oleh kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap terhadap *internet reporting*. Persamaan 3 dapat diolah dengan alat SPSS v.15.0 karena data yang tersaji dari variabel opini BPK bersifat konstan atau data tersebut memiliki nilai yang sama.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*)

<i>Model</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Persamaan 1	0,278
Persamaan 2	0,068
Persamaan 3	----
Persamaan 4	0.219

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan tabel 7 nilai *Adjusted R²* persamaan 1 sebesar 0,278 atau 27,8% persamaan 2 0,068 atau 6,8% dan persamaan 4 21,9% yang berarti variasi dari variabel *internet reporting*

dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen kecuali persamaan 3 yang tidak memunculkan hasil karena variabel opini BPK terdiri dari nilai yang sama atau konstan.

Uji Hipotesis Persamaan 1

Tabel 8
Hasil Perhitungan Regresi Hipotesis Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
(Constant)	0,106	
Leverage (LEV)	-3,148	0,048
Opini BPK	-	-
Tingkat Kemandirian Keuangan Pemda (TKKP)	0,929	0,005

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan tabel 8 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IR = 0,106 - 3,148 LEV + 0,929 TKKP + e$$

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Uji Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai sig. 0,048 dengan nilai koefisien sebesar -3,148. Hipotesis ini diterima pada alpha 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *internet reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa H1 **diterima**.

2. Uji Hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan tabel 8, hipotesis ke-2 tidak memunculkan hasil pengujian regresi dikarenakan data dalam variabel tersebut bersifat konstan. Maka dapat disimpulkan bahwa opini BPK tidak berpengaruh terhadap *internet reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa H2 **ditolak**.

3. Uji Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai sig. 0,005 dengan nilai koefisien sebesar 0,929. Hipotesis ini diterima pada alpha 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemda berpengaruh positif signifikan terhadap *internet reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa H3 **diterima**.

Uji Hipotesis Persamaan 2 (H₄)

Tabel 9
Hasil Perhitungan Regresi Hipotesis Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
(Constant)	0,047	
Leverage (LEV)	-2,654	0,191
Kompetisi Politik (KOMPOL)	0,387	0,193
Moderasi Leverage (MOD_LEV)	-0,043	0,448

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan tabel 9 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IR = 0,047 - 2,654 LEV + 0,387 KOMPOL - 0,043 MODLEV + e$$

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* yang dimoderasi oleh variabel kompetisi politik memiliki nilai sig. 0,448 dengan nilai koefisien sebesar -0,043. Hipotesis ini diterima pada alpha 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang dimoderasi kompetisi politik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *internet reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa H4 **ditolak**.

Uji Hipotesis Persamaan 3 (H₅)

Tabel 10
Hasil Perhitungan Regresi Hipotesis Persamaan 3

Model	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
(Constant)	--	
Opini BPK	--	--
Kompetisi Politik (KOMPOL)	--	--
Moderasi Tingkat kemandirian keuangan pemda (MOD_TKKP)	--	--

Sumber: Output SPSS v.15.0

Hasil perhitungan regresi linier berganda untuk persamaan ke-3 tidak mampu diolah dengan menggunakan alat SPSS v.15.0 dikarenakan data yang menggambarkan tentang opini BPK bersifat konstan. Maka dapat disimpulkan bahwa opini BPK yang dimoderasi oleh kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap *internet reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa H₅ ditolak.

Uji Hipotesis Persamaan 4 (H₆)

Tabel 11
Hasil Perhitungan Regresi Hipotesis Persamaan 4

Model	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
(Constant)	-0,551	
Tingkat kemandirian keuangan pemda (TKKP)	2,187	0,027
Kompetisi Politik (KOMPOL)	1,112	0,109
Moderasi Tingkat kemandirian keuangan pemda (MOD_TKKP)	-2,565	0,162

Sumber: Output SPSS v.15.0

Berdasarkan tabel 11 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IR = -0,551 - 2,187 TKKP + 1,112 KOMPOL - 2,565 MODTKKP + e$$

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.30 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemandirian keuangan pemda yang dimoderasi oleh variabel kompetisi politik memiliki nilai sig. 0,162 dengan nilai koefisien sebesar -2,565. Hipotesis ini diterima pada alpha 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemda yang dimoderasi kompetisi politik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *internet reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa H6 **ditolak**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, terdapat dua hipotesis diterima dari enam hipotesis yang diajukan, variabel tersebut adalah *leverage* dan tingkat kemandirian keuangan pemda. Kedua, Opini BPK tidak mampu memengaruhi pelaporan keuangan melalui internet pemerintah daerah karena data penelitian yang konstan sehingga tidak dapat diolah. Ketiga, *leverage*, Opini BPK, dan tingkat kemandirian keuangan pemda yang dimoderasi oleh kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap *internet reporting*. Hasil penelitian menunjukkan kompetisi politik cenderung memperlemah tingkat signifikan dari variabel independen. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh belum dianggap pentingnya *internet reporting* oleh pemerintah, sehingga peranan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Saran

1. Memperluas sampel penelitian seperti ditambah tahun pengamatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat menguji teori dengan baik.
2. Mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi *internet reporting* atau mengganti variabel moderasi.

3. Menggunakan variabel kompetisi politik dapat mempertimbangkan proksi lainnya, dikarenakan untuk proksi pada penelitian ini dirasa kurang dapat menggambarkan realitas lapangan.

Keterbatasan

1. Masih rendahnya kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam memengaruhi variabel dependen.
2. Tahun pengamatan yang hanya dilakukan satu tahun mengakibatkan salah satu variabel tidak memiliki variasi nilai yang berakibat pada data variabel tersebut tidak dapat diolah dengan SPSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Bagas Prasetyo (2012). "Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Melalui Website Perbankan Di Indonesia". *Skripsi* : Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
- Donaldson, L dan Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory:CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1): 49-64
- Ettredge, M., V.J. Richardson and S. Scholz, (2001), "The Presentation of Financial Information at Corporate Web Sites," *International Journal of Accounting Information Systems*. 149-168.
- Ghozali, I. dan Chariri, A. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilmi, A.K., dan Martani, D. (2012), "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi". *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Ingram, R. W. (1984), "Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices", *JSTOR, University of Chicago Economic Incentives and the Choice of State Gove*, 22(1), 126–144.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

- Medina, Febri .(2012). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Repositori, Universitas Indonesia.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016), Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pratolo, S dan Amalisa, CR (2013), Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol.14*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ; Budget Brief Indeks Keterbukaan Badan Publik, <http://seknasfitra.org/publication/budget-brief-indeks-keterbukaan-badan-publik/> . Diakses tanggal 01 Mei 2018 pk 12.45
- Styles, Alan K. & Tennyson, Mack (2007) "The accessibility of financial reporting of u.s. municipalities on the internet", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 19 Issue: 1, pp.56-92
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Sinaga, Y. F dan Prabowo, Tri Jatmiko Wahyu. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemda. *Jurnal Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/>.
- Wiguna, Mahmuddin. (2016), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2014). *FEB:Universitas Sebelas Maret* (Unpublished)